



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/252/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/16/2024
TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa masih banyaknya usulan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil untuk Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu merubah Keputusan Sekretaris Daerah Aceh Singkil Nomor 188.45/16/2024 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.45/16/2024 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Q

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.45/16/2024 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.45/128/2024 tentang perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.45/16/2024 tentang Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2024

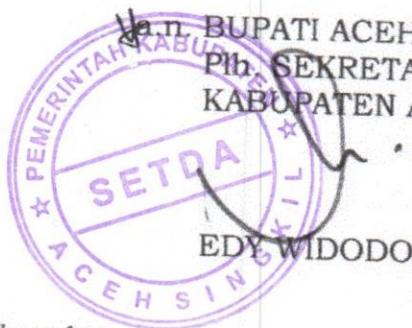
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/16/2024 TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menambah Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juli 2024

17 Muharram 1446 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45 / 252 / 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL NOMOR 188.45/16/2024 TENTANG
 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN
 2024

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Penghentian pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik			√		Mengatur Tata cara SKPP melalui Aplikasi secara elektronik	Adanya pedomasn penerbitan SKPP Gasi PNS	Bidang perbendaharaan
2.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK Aceh Singkil			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur mekanisme pengelolaan belanja di perintah Kabupaten Aceh Singkil	Adanya Pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK Aceh Singkil	Bidang perbendaharaan
3.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Penjabaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Anggaran

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
4.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang anggaran
5.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang anggaran
6.	Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten	Pejujruk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			√	Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi daerah	Mengatur Pejujruk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ajukan Pejujruk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang anggaran
7.	Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Badan Permusyawaratan Kampung Antar Waktu			√	Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung	Mengatur tentang pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang meninggal, mengundurkan diri dan pindah	Adanya pedoman antar waktu anggota BPKamp	

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGANTURAN	PELAKSANAAN	KETTERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
8.	Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Kepengurusan Posyantek dan Lembaga Posyantek			√	Permentdes Nomor 23 Tahun 2017	Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Posyantek diharapkan untuk percepatan Akselerasi Ahli teknologi kepada masyarakat.	Sebagai hukum payung bagi pengelola Posyantek di Kabupaten Aceh Singkil, Untuk pengawasan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga Kemasyarakatan Kampung	Kepengurusan Posyantek dan Lembaga Posyantek
9.	Bagian Organisasi Setdakab	Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024	Acuan Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2024	
10.	Bagian Hukum Setdakab	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil			√	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Standar Operasional Dan Prosedur Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
11.	Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024			√	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar			√	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Mekanisme Pembayaran Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar	Acuan Pembayaran Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kurang Bayar	
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	√			Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026	Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil	

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026	Pelaksanaan Rencana Kerja pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	
18.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tata Naskah Dinas			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengatur Tata Tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah	Pedoman pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024	√			Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Mengatur Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kampung Dalam Aceh Singkil Tahun 2024	Pedoman penatausahaan keuangan dan belanja Pemerintah Kampung	
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024	√			Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Mengatur tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024	

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGANTURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
21.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Program Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Dan Pekerja Di Ekosistem Perkebunan Sawit Atau Pekerja Dari Produk Turunan Perkebunan Sawit			√	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan Ketenagakerjaan	Mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah	- optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan - penjaminan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak	Penambahan Propempertubup pada Tahap I
22.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil			√	- Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertubup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGANTURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
23.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil			√	<ul style="list-style-type: none"> - Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional - Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi 	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman dalam Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempubup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
24.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Organisasi, Fungsi serta Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil			√	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Birokrasi 	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I
25.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Organisasi, Fungsi serta Badan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil			√	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Pedoman Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			ROUTIN	REVISI	BARU				
26.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil			√	- Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil	Pedoman penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
27.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil			√	- Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional - Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Birokrasi	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
28.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil			√	- Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional - Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman dalam penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I
29.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil			√	- Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional - Permenpan dan RB	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Dalam penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propermepub pada Tahap I

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
30.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten			√	Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	Mengatur Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	Pedoman dalam Pemberian Insentif Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
31.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik			√	Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	Mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	Pedoman dalam Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	Penambahan Propemperbup pada Tahap I
32.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			√	Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengatur pedoman dan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap II

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan partai Lokal di DPRK Periode 2024-2029			√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2026 tentang Tata Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	Mengatur Perhitungan dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK	Perhitungan dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
34.	Bagian Organisasi Setdakab	Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Masjid Agung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil			√	- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Syariat Islam dan pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.	Mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.	Pedoman Dalam penyusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.	Penambahan Propemperbup pada Tahap II

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
35.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil			√	- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Mengatur Penerapan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertbup pada Tahap II
36.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil			√	- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Mengatur Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman Penerapan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propempertbup pada Tahap II

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETTERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Kampung		√		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Mengatur Tata Cara Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Kampung	Pedoman Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Kampung	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
38.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara Penyaluran Dana Desa		√		- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Mengatur Tata Cara Penyaluran Dana Desa	Pedoman Tata Cara Penyaluran Dana Desa	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
39.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung		√		- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi	Mengatur Pengelolaan Keuangan Kampung	Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung	Penambahan Propemperbup pada Tahap II

✓

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
43.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Delegasi Kewenangan Rancangan Qanun Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung		√		- Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung	Mengatur Kewenangan Rancangan Qanun Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung	Delegasi Kewenangan Rancangan Qanun Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
44.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung			√	- Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung	Mengatur Tata Cara Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung	Pedoman Tata Cara Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung	Penambahan Propemperbup pada Tahap II
45.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil		√		- Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kab	Mengatur besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Ulama Kabupaten Aceh Singkil	Pedoman dalam Tata Cara pembayaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	Penambahan Propemperbup pada Tahap II

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
			RUTIN	REVISI	BARU				
46.	Bagian Pemerintahan Setdakab	Penghapusan Penggabungan Persiapan Mukti Harapan ke kampung Mukti Jaya kecamatan Singkohor dan kampung Harapan ke Jaya			√	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengatur Penggabungan Kampung Persiapan Mukti Harapan ke kampung Mukti Jaya kecamatan Singkohor	Pedoman dalam Penggabungan Kampung Persiapan Mukti Harapan ke kampung Mukti Jaya kecamatan Singkohor	Penambahan Propempertub pada Tahap II



M. n. BUPATI ACEH SINGKIL
 P. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDDODO

11